

The Role of the Tourism Office in Increasing Tourist Visit Rates in the New Normal Era

Sulmiah¹, Muh. Nurkhalis², Muhammad Nur Yamin^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

e-mail: nuryamin@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to show what the role of the Tourism Office is in increasing the number of tourist visits to Makassar City in the new normal era. This research uses a qualitative approach and produces descriptive data. Data collection was used by interview, observation and documentation techniques. The data obtained from the research results are processed using interactive model analysis, namely data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the role played by the Tourism Office in increasing the number of tourist visits to Makassar City in the new normal era is seen from the four theoretical variables used, namely the regulatory variables the policies pursued by the government have been carried out well. the second variable is the government facilitator making efforts to guarantee tourism so that tourists can visit it. This is done by socializing the application of health protocols properly, then the third variable, namely the government motivator, is doing the most effective way, namely promotion and carrying out massive activities. The last dynamic variable is managing visitors. directly by the destination manager.

Keywords: Tourism, New normal

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan manusia modern. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemudahan bagi semua kalangan untuk bisa mencari dan menikmati berbagai tempat yang akan dikunjungi. Indonesia merupakan satu dari banyak negara di dunia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya pariwisata yang mendunia (Azis, 2022). Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pariwisata tertinggi nomor sembilan di dunia versi *The World Travel and Tourism Council (WTTC)*. Pariwisata merupakan salah satu sektor

unggulan dalam perekonomian nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan, pariwisata dapat menjadi sektor penghasil devisa terbesar, bahkan kini menjadi penyumbang devisa nasional keempat terbesar setelah kelapa sawit, minyak dan gas bumi serta pertambangan (Fadillah, 2021).

Dinas Pariwisata Kota Makassar secara umum memiliki tugas pokok yaitu Menyusun rencana, kebijakan operasional, mengendalikan dalam menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pariwisata yang meliputi ketatausahaan, sarana pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran pariwisata dan salah satu fungsinya untuk melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan merumuskan kebijakan operasional dalam bidang pariwisata dalam rangka menetapkan kebijakan oleh pemerintah (Mulyani, 2015) .

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam peningkatan wisatawan dalam Kota Makassar yaitu melakukan promosi pariwisata sebagai salah satu upaya nyata dalam mempromosikan potensi-potensi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri, dengan cara menyebarkan brosur- brosur, pamflet-pamflet, dan selebaran berkaitan dengan obyek dan daya tarik wisata di lokasi-lokasi strategis. Selain itu juga dengan mengirim tim kesenian ke luar daerah maupun luar negeri. Oleh karena itu pengelolaan obyek wisata yang professional tentu memerlukan SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas. Kota Makassar yang meliputi pelatihan penguasaan bahasa asing, pemahaman masalah pariwisata secara umum, dan pelatihan kelompok penyelawat wisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah sebagai salah satu dinas daerah adalah organisasi pariwisata daerah yang merupakan bagian dari dinas daerah dan daerah lainnya sebagai unsur pelaksanaan daerah dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan daerah di sektor pariwisata.

Pandemi covid-19 telah melanda industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sejak februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158 ribu. Jika ditotal, sepanjang tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4,052 juta orang. Angka tersebut sangat memprihatinkan, karena dari total tersebut hanya sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada 2019. Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata. Adanya pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar-masuk Indonesia, menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar Rp20,7 miliar. Penurunan wisatawan mancanegara berdampak langsung pada okupansi hotel-hotel di Indonesia. Bulan Januari - Februari, okupansi masih di angka 49,17% dan 49,22%. Namun di bulan Maret menjadi 32,24%, dan memburuk saat memasuki bulan April, yaitu sebesar 12,67%. Dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja. Sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, dan 939 ribu orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Di sisi lain, pandemi covid-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata.

Menurut data BPS 2020, sekitar 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia. Ada tiga fase “penyelamatan” yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Fase tanggap darurat fokuskan pada kesehatan, seperti menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas saat WFH (*Work from Home*), melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata, serta melakukan persiapan pemulihan.

Adapun fase pemulihan, di mana dilakukan pembukaan secara bertahap tempat wisata di Indonesia. Terakhir adalah fase normalisasi, yaitu persiapan destinasi dengan protokol CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*), meningkatkan minat pasar, hingga diskon untuk paket wisata dan MICE (*meetings, incentives, conventions and exhibitions*). Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah *virtual travel fair* sejak bulan Agustus-September 2020 (Kemenparekraf/Baparekraf).

Fenomena pandemi covid-19 mengakibatkan Melemahnya industri pariwisata di Kota Makassar. Muhammad Roem (Kepala Dinas Pariwisata 2022) menjelaskan “sejak merebaknya pandemi covid-19, sektor pariwisata mulai terganggu bahkan kolaps”. Karena ada pergeseran atau perpindahan perilaku manusia dimana mereka harus berada di rumah untuk mencegah penyebaran virus Corona. Pergerakan masyarakat dibatasi dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Artinya semua harus di rumah saja sehingga tidak ada aktivitas kepariwisataan yang dilakukan baik itu diskala internasional, nasional maupun lokal. Kendati demikian, kepariwisataan perlahan bergerak pada februari 2021 karena adanya kebijakan-kebijakan baru berkenan dengan perilaku *new normal* masyarakat.

METODE

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengetahui Peran dinas pariwisata dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan di era *new normal*. Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar. Data primer penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata, pihak destinasi pariwisata, wisatawan dan masyarakat pelaku usaha. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data-data sekunder yang didapat peneliti adalah data-data dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan strategi Dinas Pariwisata dalam meningkatkan angka kunjungan Wisatawan di Kota Makassar.

Pengecekan dan keabsahan data bertujuan untuk menguji kredibilitas data atau untuk mendapatkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Pengujian dan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara Triangulasi dan member check. Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data,

dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan diajukan dalam penyusunan penelitian. Adapun langkah-langkahnya yaitu Kondensasi Data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Salah satu pemicu kunjungan wisatawan ke suatu daerah adalah aktivitas pegelaran seni budaya dan olahraga karena pelaksanaan pada setiap *event* akan menstimulasi massa untuk hadir pada perhelatan tersebut yang berdampak terhadap perputaran uang yang cukup tinggi di sekitar pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam peningkatan *event* yang berkualitas dapat menstimulasi datangnya wisatawan ke kota Makassar. Adapun beberapa peran pemerintah sebagai Regulator sebagai berikut:

- a. Kebijakan dari dinas pada saat era *new normal* dilihat dari surat edaran dari Walikota Makassar yang mengatur tentang kapasitas kunjungan di destinasi wisata yakni 50 persen dari jumlah normal kemudian mengatur tentang protokol kesehatan menyambut era *new normal* harus di persiapkan oleh pemerintah hal tersebut dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan maksimal atau dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat.
- b. Pemerintah Kota Makassar melibatkan semua pihak di kota Makassar sehingga terjadi keterbukaan publik dimasyarakat. Berikut beberapa faktor penghambat Penerapan Kebijakan PSBB di Kota Makassar yaitu
 - 1) Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang semakin meluas dan diperpanjang dapat meningkatkan kecemasan sosial.
 - 2) Banyak masyarakat yang masih melanggar aturan dengan berbagai alasan. Masyarakat tidak merasa takut akan sanksi karena seperti yang kita ketahui penerapan sanksi memang belum diterapkan maksimal.

Selain penerapan PPKM di Kota Makassar, juga diberikan beberapa kebijakan seperti penerapan CHSE pada seluruh industri dan daya tarik wisata untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung.

- c. Beberapa upaya harus dilakukan agar pariwisata segera pulih, salah satu strategi yang diterapkan pemerintah adalah Program CHSE (*Clean, health, Safety dan Environment*) yang bertujuan untuk menerapkan protokol kesehatan di destinasi wisata sehingga terciptanya rasa kepercayaan wisatawan yang akan mengunjungi destinasi wisata, salah satunya anjungan di TMII (Taman Mini Indonesia Indah). Realisasi dari penerapan program ini dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada wisatawan dalam bentuk edukasi, melalui

media massa dan media sosial serta melalui gerakan-gerakan sadar penerapan CHSE (*Clean, health, Safety dan Environment*) secara rutin yang berkolaborasi antara para stakeholder.

- d. Keberhasilan dari kebijakan aturan yang telah dibuat, hasil kebijakan tersebut menunjukkan angka kunjungan yang sangat signifikan sangat tinggi dan sangat efektif karena telah menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan pengunjung.

Ada beberapa kebijakan yang ditempuh, khususnya dalam membatasi aktifitas kegiatan di industri dan daya tarik wisata, seperti jam operasional dan jumlah pengunjung yang dibatasi. Isi kebijakan tersebut Selain penerapan PPKM di Kota Makassar, juga diberikan beberapa kebijakan seperti penerapan CHSE (*Clean, health, Safety dan Environment*) pada seluruh industri dan daya tarik wisata untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Kebijakan tersebut disosialisasikan melalui pertemuan langsung dengan pengusaha, melalui media massa dan media sosial serta melalui gerakan-gerakan sadar penerapan CHSE (*Clean, health, Safety dan Environment*) secara rutin yang berkolaborasi antara para stakeholder. Pemerintah juga mengatakn bahwa tingkat keberhasilan sangat tinggi karena jumlah kunjungan dan tingkat hunian di hotel semakin memperlihatkan grafik yang sangat memuaskan.

2. Fasilitator

Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Makassar. Adapun pada prakteknya Pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat. Selain dari segi sarana prasarana, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga sangat berperan dalam hal promosi dan pemasaran wisata. Adapun peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya fasilitas pendukung pariwisata yang ada merupakan salah satu faktor yang mendukung berkembang dan berjalan lancarnya sektor pariwisata Daerah. Pemerintah harus melengkapi sarana dan prasarana yang terdiri dari beberapa fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan wisatawan seperti menyiapkan transportasi bagi wisatawan, menyediakan akomodasi objek wisata, dan menciptakan tempat wisata buatan atau variasi objek wisata. Ketika fasilitas yang disediakan memadai dan sesuai dengan fungsinya masing-masing maka pengunjung tidak akan kecewa untuk berkunjung dan masih tertarik untuk berkunjung di hari-hari berikutnya. kondisi sarana dan prasarana masih perlu kreatif yang lebih optimal untuk penunjang daya tarik bagi wisatawan. Pemerintah harus selalu berinovasi baru dalam meningkatkan wisatawan dengan melakukan perubahan-perubahan secara bertahap karena jika hal ini tidak dipenuhi maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan terlaksana.
- b. Dinas Pariwisata Kota Makassar, Sulsel, tengah merumuskan formulasi pariwisata secara berkelanjutan dalam menggairahkan kembali sektor

pariwisata di masa pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Dinas Pariwisata gencar melaksanakan *event-event*, baik skala lokal, nasional maupun internasional. Pada tahun 2022, telah diluncurkan 50 *event* termasuk F8 yang berskala internasional yang mampu mendatangkan banyak pengunjung. peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Makassar dalam melakukan pemulihan sektor wisata perlu didorong untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi yang sedang bergerak.

Peneiliti menemukan bahwa peran Dinas Parawisata Kota Makassar sebagai fasilitator adalah Pemerintah melakukan upaya dalam menjamin tempat wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan hal tersebut dilakukan dengan cara mensosialisasikan penerapan protokol Kesehatan dengan ketat, ini dilakukan secara terus menerus dan dievaluasi se2tiap 3 bulan, sehingga jaminan keamanan dan kenyamanan pengunjung dapat memberikan citra aman di Kota Makassar. selain itu Membantu mempersiapkan penerapan protokol Kesehatan dan CHSE (*Clean, health, Safety dan Environment*). Melaksanakan kegiatan rutin di tempat-tempat wisata dengan mendatangkan artis artis local serta tarian tradisional. Mengundang para pengusaha untuk diberikan pembekalan protokol kesehatan.

3. Motivator

Motivator dalam pengelolaan pariwisata, peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengelolaan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari dukungan investor, pengusaha wisata serta masyarakat. investor sebagai pemilik modalnya di obyek wisata, pengusaha di bidang pariwisata daat mengembangkan wisata dan masyarakat mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari pengembangan pariwisata di lingkungan mereka.

Adapun peran sebagai motivator adalah sebagai pengembangan promosi secara intensif sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan destinasi wisata karena dapat membuka daya tarik wisatawan, baik wisatawan local maupun wisatawan mancanegara. sektor pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal jika tidak ada campur tangan dari Pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas akses jalan, mencari wisatawan dan mempromosikan tempat wisata tersebut.

Peneiliti menemukan bahwa peran Dinas Parawisata Kota Makassar sebagai motivator adalah pemerintah melakukan cara yang paling ampuh adalah promosi, meskipun ada beberapalangkah lain yg bisa ditempuh seperti dengan melaksanakan event secara massif, membuat MoU atau bekerjasama dengan daerah lain dalam pelaksanaan kepariwisataan. Selain itu Pemerintah membuat paket wisata yang lebih menarik dan variative dengan mengutamakan protokol kesehatan. Peneliti juga melihat Pemerintah bekerja sama dengan pengelola

industri pariwisata seperti hotel, restoran dan biro perjalanan wisata.

4. Dinamisator

Dinamisator dalam pilar *Good Governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata di Wisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata. Adapun peran pemerintah sebagai dinamisator adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Adapun pelatihan khusus yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Makassar kepada pihak pengelola dan pelaku usaha dalam pengelolaan Wisatawan pada era *new normal* yaitu memberikan pembekalan kepada pihak pengelola mengenai pentingnya penerapan protokol covid-19. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dari kementerian, pemerintah melakukan pelatihan dengan mengajak semua pelaku usaha dan pengelola wisata. Pelatihan yang diberikan berupa tata cara melayani pengunjung. Namun partisipasi pelaku usaha dalam mengikuti setiap pelatihan yang diadakan masih kurang.
- b. Dinas Pariwisata melaksanakan pembangunan pariwisata dengan pihak masyarakat dalam pengelolaan Wisata karena Dinas Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri dan bekerja sendiri untuk mengelola wisata tanpa campur tangan pemegang kekuasaan yang ada yaitu pemerintah, investor dan masyarakat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Makassar juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam pengadaan anggaran untuk perbaikan beberapa sarana dan prasarana di wisata, namun belum ada dari pihak investor yang tertarik untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan wisata.

Peran Dinas Pariwisata Kota Makassar sebagai dinamisator adalah Pemerintah belum melakukan pelatihan khusus, yang dilaksanakan adalah pendekatan persuasif tentang bagaimana menerapkan sadar wisata dan sapta pesona, pemerintah juga hanya melakukan sosialisasi tentang CHSE (*Clean, health, Safety dan Environment*). Peneliti juga melihat bentuk Kerjasama antar sektor swasta, sektor pemerintah lainnya maupun masyarakat dalam pengelolaan pengunjung wisata di era *new normal*. dalam pengelolaan pengunjung, pemerintah hanya mengontrol dan mengevaluasi, seluruh pendapatan daya tarik wisata dari pengunjung dikelola langsung oleh pengelola baik swasta maupun kelompok masyarakat. Pengelolaan pengunjung dilakukan langsung oleh pengelola destinasi, selain itu mereka saling melengkapi dalam pembagian tugas pengawasan penerapan protokol kesehatan serta melaksanakan koordinasi rutin dengan para pihak terkait untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ditempuh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa, peran Dinas Pariwisata Kota Makassar jika di lihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Sebagai Regulator

Peran Dinas Pariwisata Kota Makassar sebagai regulator sudah terlaksana dengan baik dikarenakan adanya beberapa instruksi Mendagri yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Walikota, surat edaran Walikota Makassar tentang pemberlakuan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), dan surat edaran Kepala Dinas Pariwisata tentang penerapan protokol kesehatan bagi industri Pariwisata. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah khususnya dalam membatasi aktifitas kegiatan di industri dan daya tarik wisata, seperti jam operasional dan jumlah pengunjung yang dibatasi. Isi kebijakan tersebut Selain penerapan PPKM di Kota Makassar, juga diberikan beberapa kebijakan seperti penerapan CHSE (*Clean, health, Safety dan Environment*) pada seluruh industri dan daya tarik wisata untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung.

2. Sebagai Fasilitator

Peran Dinas Pariwisata Kota Makassar sebagai fasilitator sudah terlaksana dengan baik dikarenakan pemerintah melakukan upaya dalam menjamin tempat wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan, membantu mempersiapkan penerapan protokol Kesehatan dan CHSE (*Clean, health, Safety dan Environment*) serta pemulihan sektor pariwisata dengan cara Dinas Pariwisata gencar melaksanakan event-event, baik skala lokal, nasional maupun internasional. Pada tahun 2022, telah diluncurkan 50 event termasuk F8 yang berskala internasional yang mampu mendatangkan banyak pengunjung.

3. Sebagai Motivator

Peran Dinas Pariwisata Kota Makassar sebagai motivator sudah dilaksanakan dengan baik, namun kekurangannya disini adalah dinas pariwisata hanya melakukan satu langkah yaitu dengan langkah promosi, meskipun ada beberapa langkah lain yg bisa ditempuh seperti dengan melaksanakan event secara massif, membuat MoU atau bekerjasama dengan daerah lain dalam pelaksanaan kepariwisataan.

4. Sebagai Dinamisator

Peran Dinas Pariwisata Kota Makassar sebagai dinamisator sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala yaitu pemerintah belum melakukan pelatihan khusus, tetapi yang dilaksanakan adalah pendekatan persuasif tentang bagaimana menerapkan sadar wisata dan sapta pesona.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. 2022. Strategi Pemasaran Pariwisata Masa Pandemi di Kota Makassar.
- Fadillah, I., Mone, A., & Riskasari. 2021. Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Destinasi Wisata di Provinsi Sulawesi Selatan. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>. 2(1).
- Mulyani, L, H. 2015. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Wisatawan Domestik di Kota Makassar.
- Misdrinaya, M. 2017. Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Makassar Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar.
- Pitana, I, G., dan Gayatri, P, G. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta:CV Andi Offset Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV.Afabeta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Jurnal Aktor

Vol. 2, No. 3, Juni 2023

p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167

Jurnal Aktor

Vol. 2, No. 3, Juni 2023

p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167

Jurnal Aktor

Vol. 2, No. 3, Juni 2023

p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167

Jurnal Aktor

Vol. 2, No. 3, Juni 2023

p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167